



Pengaruh Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Kebijakan Koefisien Alpha terhadap Kenaikan Upah Pasca Terbitnya Pp No 49/2025 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta

Rusman Ali^{1*}, Tri Hadi Sulistyanto²

¹⁻²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja Purwakarta, Indonesia

Email: rusmanali10@gmail.com¹, tri.sulistyanto@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: rusmanali10@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of inflation and economic growth on the Regency Minimum Wage (UMK) in Purwakarta Regency and to simulate the impact of the latest government regulation, Government Regulation Number 49 of 2025. The research employs a quantitative approach with a causal associative design, supported by descriptive analysis and policy simulation. The data used are secondary time series data from 2015 to 2025 obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and related institutions. Data analysis techniques include multiple linear regression and policy simulation modeling. The results indicate that simultaneously, inflation and economic growth do not have a significant effect on the UMK in Purwakarta Regency, as shown by a significance value of 0.685 (>0.05) and a coefficient of determination of 0.090. Partially, both variables also show no significant effect, suggesting that minimum wage determination is more influenced by policy factors and industrial relations dynamics rather than macroeconomic variables. Meanwhile, the policy simulation results reveal that changes in the alpha coefficient (α) in Government Regulation No. 49 of 2025 significantly affect the magnitude of UMK increases, where a higher α value leads to a greater contribution of economic growth to wages. This study highlights the crucial role of policy in moderating the relationship between economic variables and labor welfare.*

Keywords: *Alpha Coefficient; Economic Growth; Inflation; Minimum Wage; Wage Policy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Purwakarta serta mensimulasikan dampak penerapan kebijakan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal dan didukung oleh analisis deskriptif serta simulasi kebijakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder runtun waktu (*time series*) periode 2015–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dan simulasi perhitungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK di Kabupaten Purwakarta, dengan nilai signifikansi sebesar 0,685 ($>0,05$) dan koefisien determinasi sebesar 0,090. Secara parsial, kedua variabel juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa penetapan UMK lebih dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan dinamika hubungan industrial dibandingkan variabel makroekonomi. Sementara itu, hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa perubahan nilai koefisien alfa (α) dalam PP No. 49 Tahun 2025 berpengaruh terhadap besaran kenaikan UMK, di mana semakin tinggi nilai α maka semakin besar kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap upah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran kebijakan dalam memoderasi hubungan antara variabel ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja.

Kata kunci: Inflasi; Kebijakan Pengupahan; Koefisien Alfa; Pertumbuhan Ekonomi; UMK.

1. LATAR BELAKANG

Upah minimum merupakan instrumen strategis dalam perekonomian yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup layak serta sebagai komponen biaya produksi yang memengaruhi daya saing dunia usaha. Dalam perspektif ekonomi makro, penetapan upah idealnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi, khususnya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Charysa, 2013).

Inflasi merepresentasikan perubahan daya beli masyarakat sehingga kenaikan upah diperlukan untuk menjaga nilai riil pendapatan pekerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan output dan produktivitas yang secara teoritis seharusnya terdistribusi kepada tenaga kerja.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme penentuan upah di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh regulasi pemerintah yang terus mengalami perubahan. Kebijakan pengupahan mengalami dinamika dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, hingga terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi terakhir memperkenalkan fleksibilitas melalui koefisien alfa (α) dalam rentang 0,50 hingga 0,90 yang berfungsi sebagai variabel pengali pertumbuhan ekonomi dalam formula penyesuaian upah. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan upah pekerja.

Meskipun secara normatif inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel utama dalam penetapan upah minimum, berbagai penelitian empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sejumlah studi menemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap kenaikan upah karena berkaitan langsung dengan daya beli pekerja (Yudea, 2020). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap upah minimum, khususnya pada daerah dengan struktur industri padat modal, di mana peningkatan output tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja (Bulqis, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori ekonomi dan praktik kebijakan pengupahan.

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah industri di Jawa Barat yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik. Di satu sisi, daerah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor manufaktur. Namun, pertumbuhan tersebut cenderung bersifat padat modal sehingga tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Di sisi lain, tingkat inflasi yang fluktuatif memberikan tekanan terhadap daya beli pekerja. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara pergerakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di wilayah ini.

Data periode 2020-2025 menunjukkan bahwa laju inflasi di Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuasi signifikan, terutama pada tahun 2022 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola pemulihan pascapandemi (Kab. Purwakarta, 2022).

Namun demikian, kenaikan UMK pada periode yang sama tidak selalu sejalan dengan dinamika kedua variabel tersebut. Pada tahun tertentu, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak diikuti oleh kenaikan UMK yang proporsional, sedangkan pada periode inflasi tinggi, kenaikan upah cenderung tertahan oleh kebijakan batasan regulasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi distorsi antara indikator makroekonomi dan kebijakan pengupahan.

Perubahan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dengan perluasan rentang koefisien alfa diperkirakan akan mengubah hubungan antara variabel makroekonomi dan penetapan upah minimum. Namun, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara empiris mengkaji dampak penerapan koefisien alfa dalam rentang yang lebih luas terhadap sensitivitas kenaikan UMK di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Purwakarta serta menguji peran koefisien alfa sebagai variabel moderasi dalam kerangka kebijakan terbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi perumusan kebijakan pengupahan yang lebih berbasis data serta mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Upah dan Upah Minimum

Secara historis, upah merupakan bayaran yang diterima pekerja sebagai kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Pemikiran klasik mengenai upah salah satunya dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle melalui *Iron Law of Wages*, yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang upah riil cenderung berada pada tingkat minimum untuk mempertahankan kehidupan pekerja. Teori ini menunjukkan adanya tekanan struktural dalam pasar tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep upah juga dikaitkan dengan kondisi makroekonomi melalui A. W. Phillips yang menjelaskan hubungan antara upah nominal dan tingkat pengangguran (Phillips dalam Sleeman, 2011). Kurva Phillips menjadi dasar dalam memahami bahwa dinamika upah dipengaruhi oleh inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja.

Dalam konteks modern, upah minimum ditetapkan sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin standar hidup layak bagi pekerja. Di Indonesia, kebijakan ini telah berkembang sejak 1969 dan terus mengalami penyesuaian sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja serta upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Teori Inflasi dan Daya Beli

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Dalam perspektif teori daya beli (*Purchasing Power Parity*), kenaikan inflasi tanpa diimbangi peningkatan upah akan menurunkan nilai riil pendapatan pekerja (Mankiw dalam Sinaga, 2025).

Penelitian Soekapdjo & Oktavia (2021) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pengupahan, terutama dalam menjaga daya beli pekerja. Temuan ini diperkuat oleh Yarlina (2020) yang menyatakan bahwa ketidaktepatan penyesuaian inflasi dalam formula upah dapat menurunkan kesejahteraan buruh. Namun demikian, penelitian Tiwu & Angi (2024) menunjukkan bahwa pada kondisi inflasi yang relatif stabil, pengaruh inflasi terhadap kenaikan upah minimum menjadi kurang signifikan dibandingkan variabel lain.

Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Upah

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan output suatu wilayah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam teori produktivitas marjinal, peningkatan output ekonomi seharusnya diikuti oleh peningkatan imbal hasil bagi faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Namun, hubungan ini tidak selalu linear. Penelitian oleh Triwahyuningtyas dkk. (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan pekerja, tetapi sangat bergantung pada proporsi distribusinya.

Sementara itu, penelitian Tsalsalaila & Karyadi (2021) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh kenaikan upah minimum, terutama ketika kebijakan pengupahan membatasi ruang kenaikan melalui regulasi tertentu.

Kebijakan Pengupahan dan Koefisien Alfa

Kebijakan pengupahan di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan, khususnya melalui perubahan regulasi dari PP No. 36 Tahun 2021, PP No. 51 Tahun 2023, hingga PP No. 49 Tahun 2025. Regulasi terbaru memperkenalkan variabel koefisien alfa (α) dalam formula penyesuaian upah minimum. Koefisien alfa mencerminkan tingkat kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan upah. Berdasarkan regulasi terbaru, nilai α berada dalam rentang 0,50 hingga 0,90, yang menunjukkan peningkatan peran pertumbuhan ekonomi dibandingkan regulasi sebelumnya.

Analisis dari Lembaga Riset Ekonomi Regional (2025) menunjukkan bahwa penggunaan α yang rendah pada regulasi sebelumnya menyebabkan lemahnya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah. Oleh karena itu, peningkatan rentang α dipandang sebagai upaya untuk memperkuat hubungan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal dan didukung metode deskriptif simulasi kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menguji pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta mensimulasikan dampak penerapan kebijakan terbaru. Metode ini sejalan dengan penelitian Irwati dkk. (2022) serta Ringo dkk. (2025) yang menggunakan data *time series* untuk analisis kebijakan upah. Populasi penelitian berupa data sekunder makroekonomi yang meliputi inflasi (BPS Jawa Barat), pertumbuhan ekonomi/PDRB (BPS Kabupaten Purwakarta), dan UMK (SK Gubernur Jawa Barat). Sampel penelitian menggunakan data runtun waktu tahunan periode 2015–2025 yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan data dan relevansi terhadap perubahan regulasi (Sugiyono, 2019).

Variabel penelitian terdiri dari inflasi (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2) sebagai variabel independen, serta UMK (Y) sebagai variabel dependen. Analisis data menggunakan regresi linear berganda setelah melalui uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t , uji F , dan koefisien determinasi (R^2). Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis simulasi kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dengan dua skenario koefisien α (0,50 dan 0,90), untuk memproyeksikan dampak perubahan kebijakan terhadap UMK.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta dengan periode data 2015–2025. Keterbatasan penelitian meliputi jumlah sampel yang terbatas, penggunaan variabel makro utama, serta analisis simulasi yang bersifat proyeksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 11 data observasi periode 2015–2025, diketahui bahwa variabel inflasi memiliki nilai rata-rata sebesar 2,8182% dengan rentang antara 1,16% hingga 5,14%. Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan rata-rata sebesar 4,2100% dengan nilai minimum -2,13% dan maksimum 5,45%, yang mengindikasikan adanya

fluktuasi signifikan akibat kondisi ekonomi, terutama pada masa pandemi. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki nilai minimum Rp2.600.000 dan maksimum Rp5.052.856. Secara umum, data menunjukkan bahwa ketiga variabel mengalami dinamika yang cukup beragam selama periode penelitian.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa variabel inflasi dan UMK berdistribusi normal dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,086 dan 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Namun, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga tidak berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas secara sempurna, yang berpotensi memengaruhi hasil analisis regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 0,090, yang berarti bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi hanya mampu menjelaskan 9% variasi dalam UMK, sedangkan sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nilai *Adjusted R-Square* yang bernilai negatif (-0,137) menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara optimal. Selain itu, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,685 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK di Kabupaten Purwakarta.

Pengaruh Inflasi terhadap UMK

Berdasarkan hasil analisis, variabel inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap UMK. Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori daya beli yang menyatakan bahwa kenaikan inflasi seharusnya diikuti oleh peningkatan upah untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, penyesuaian upah minimum di Kabupaten Purwakarta tidak sepenuhnya responsif terhadap perubahan inflasi.

Hal ini dapat disebabkan oleh adanya intervensi kebijakan pemerintah serta faktor lain di luar variabel ekonomi, seperti pertimbangan stabilitas industri dan kemampuan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutrisno dan Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa pada kondisi inflasi yang relatif stabil, pengaruhnya terhadap kebijakan upah menjadi kurang signifikan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap UMK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan output ekonomi di Kabupaten Purwakarta tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Fenomena ini dikenal sebagai *decoupling*, yaitu terpisahnya pertumbuhan ekonomi dari kenaikan upah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor industri padat modal, di mana pertumbuhan lebih banyak didorong oleh investasi teknologi dibandingkan penyerapan tenaga kerja. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah padat modal tidak selalu memiliki dampak signifikan terhadap upah pekerja.

Pengaruh Simultan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap UMK

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,685. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan UMK di Kabupaten Purwakarta tidak hanya ditentukan oleh variabel makroekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti regulasi pemerintah, kebijakan pengupahan, serta proses negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, variabel ekonomi tidak menjadi satu-satunya determinan dalam penentuan upah minimum.

Analisis Simulasi Kebijakan (PP No. 49 Tahun 2025)

Hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa perubahan nilai koefisien alfa (α) dalam formula pengupahan memberikan pengaruh langsung terhadap besaran kenaikan UMK. Pada skenario $\alpha = 0,50$, kenaikan upah cenderung lebih moderat dan relatif stabil, sedangkan pada skenario $\alpha = 0,90$, kenaikan UMK menjadi lebih tinggi karena kontribusi pertumbuhan ekonomi diperbesar. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien alfa berperan penting dalam menentukan sensitivitas kebijakan upah terhadap kondisi ekonomi. Dengan demikian, penetapan nilai α yang tepat menjadi kunci dalam menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Interpretasi Umum

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap UMK di Kabupaten Purwakarta. Nilai koefisien determinasi yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi UMK dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa penetapan upah minimum lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan dinamika hubungan industrial dibandingkan oleh variabel makroekonomi semata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data dalam menentukan besaran upah minimum di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Purwakarta selama periode penelitian 2015-2025. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji simultan (F) sebesar 0,685 yang lebih besar dari 0,05, serta nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,090 yang mengindikasikan bahwa hanya 9% variasi UMK dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Secara parsial, inflasi maupun pertumbuhan ekonomi juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang menandakan bahwa dalam praktiknya penetapan upah minimum tidak sepenuhnya ditentukan oleh kondisi makroekonomi, melainkan lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, regulasi pengupahan, serta dinamika hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.

Hasil analisis simulasi kebijakan menunjukkan bahwa perubahan nilai koefisien alfa (α) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 memiliki peran yang signifikan dalam menentukan besaran kenaikan UMK. Semakin tinggi nilai α , maka kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan upah akan semakin besar. Hal ini menegaskan bahwa variabel kebijakan memiliki peran strategis dalam memoderasi hubungan antara variabel makroekonomi dan upah minimum. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan disarankan untuk menetapkan nilai α secara hati-hati dan berbasis data agar mampu menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Selain itu, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan produktivitas agar mampu beradaptasi dengan kebijakan pengupahan, sementara peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja, dan faktor kelembagaan, serta menggunakan data dengan periode yang lebih panjang agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penetapan upah minimum di masa mendatang diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil dan berbasis pada pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian ini berlangsung. Kita juga berterima kasih kepada institusi yang telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Tidak lupa, penghargaan khusus disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan semangat hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR REFERENSI

- Bulqis, R. (2025). Analisis pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 35–43.
- Charysa, N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.2489>
- Irawati, A., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2021). Pengaruh upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003–2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(4), 1027–1040.
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (2022, 23 Agustus). *Pengaruh dinamika global terhadap inflasi di Purwakarta*. Portal Resmi Kabupaten Purwakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Ringo, O. S., Rotinsulu, T. O., & Tumangkeng, S. Y. L. (2025). Analisis pengaruh upah minimum provinsi, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga dan nilai tukar rupiah terhadap inflasi di Sulawesi Utara tahun 2000–2023. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(3), 65–76.
- Sinaga, R. F. M., Yusuf, M., & Arwansyah. (2025). Analisa kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 9(1), 32–46.
- Sleeman, A. G. (2011). Retrospectives: The Phillips Curve: A rushed job? *Journal of Economic Perspectives*, 25(1), 223–238.
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Triwahyuningtyas, N., Subur, S., & Murtatik, S. (2019). Analisis pengaruh distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan inflasi sebagai variabel intervening di Desa Margamulya Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 8(2), 55–65.
- Yudea, R. (2020). *Hubungan sebab-akibat antara inflasi dan upah di Indonesia* (Skripsi sarjana, Universitas Katolik Parahyangan).